

**DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA PERIKANAN DI PEDESAAN MALUKU**
*(The Impact of The Changes of Village Government System on The Performance of
Fishery Management and Resources Exploitation in Moluccas Villages*

Oleh:

Venda Jolanda Pical ¹⁾, John Haluan ²⁾, M. Fedi Sondita ²⁾, dan Victor P.H.
Nikijuluw ³⁾

ABSTRACT

Several policies of central government through the regulations of regional government have a big effect so far on the changes of the community institution structure in the villages, especially the system of village government that have an impact on the management and the exploitation of the fishery resources in Moluccas villages.

The aim of research are : to evaluate the performance of the fishery management system in Moluccas villages and to compare the performance of the fishery management system between sasi villages, the village practices the tradition of fishery community-base management, and non sasi village. It is hope that the research would be functioning as an information source for regional government in organizing and planning of sustainable fishery management in Moluccas villages. The results of research showed that the changes of the village government system had an effect on the performance of fishery resources management in Moluccas villages. The performance of fishery resources management was not different between the sasi village and non sasi village. It is recommended that there should be an effort to make the community-base management of fishery resources existed effective. There should be an effort to increase co-management.

Key words: Village government, performance, fishery, management.

ABSTRAK

Dengan berbagai kebijakan pemerintahan pusat melalui beberapa Undang-Undang pemerintahan daerah ini, selama ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan tatanan kelembagaan masyarakat di pedesaan khususnya sistem pemerintahan desa yang berdampak pula terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku.

1) Staf Pengajar FPIK Universitas Pattimura Ambon, Email : vjosephid@yahoo.com

2) Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB

3) Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap BRKP-Departemen Kelautan dan Perikanan RI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan perikanan di pedesaan Maluku dan membandingkan kinerja sistem pengelolaan perikanan antara desa sasi yaitu desa yang melaksanakan tradisi pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan desa non sasi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam menata dan meracanakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan desa memberikan pengaruh terhadap kinerja pengelolaan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku. Tidak ada perbedaan kinerja pengelolaan sumberdaya perikanan antara desa sasi dengan desa non sasi. Disarankan bahwa perlu ada upaya untuk mengefektifkan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang telah ada serta peningkatan ko-manajemen.

Kata kunci : Pemerintahan desa, kinerja, perikanan, pengelolaan.

1. PENDAHULUAN

Daerah Maluku mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang disebut sasi. Sasi merupakan salah satu tradisi masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan adat (Nikijuluw, 1994 dan Harkes, 2006) karena terkait dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sasi itu sendiri yang disebut kewang. Selanjutnya dalam perkembangannya, sistem pengelolaan perikanan secara tradisional ini berada dan berkembang dengan sistem pengelolaan secara formal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga ada hubungan dan pengaruh yang terjadi pada kelangsungan sistem pengelolaan perikanan di pedesaan Maluku. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku sampai saat ini belumlah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana salah satu faktor eksternal yang diduga mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku adalah fungsi dan peranan dari sistem pemerintahan desa

Sistem pemerintahan desa di pedesaan Maluku telah mengalami beberapa kali perubahan akibat adanya kebijakan pemerintah pusat melalui beberapa Undang-Undang pemerintahan daerah ; yaitu rezim adat yaitu

periode sebelum berlaku UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah dan UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, rezim sentralisasi yaitu periode berlakunya UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah dan UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa dan rezim otonomi daerah yaitu periode berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut Kissya (2000), Nikijuluw, (2002) dan Harkes (2006) bahwa perubahan struktur pemerintahan desa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya pelaksanaan sasi di pedesaan Maluku.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perubahan sistem pemerintahan desa tentu akan berdampak terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku. Bagaimana kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan antara desa sasi yaitu desa yang melaksanakan tradisi pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan desa non sasi?

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku dan membandingkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan antara desa sasi dan desa non sasi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam menata dan meracangkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan Maluku. Selain itu, sebagai bahan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkompeten terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir sehingga dapat membenahi dan menata pengelolaan perikanan secara lebih baik.

Hipotesis penelitian yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan sistem pemerintahan desa berdampak terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku.
2. Ada perbedaan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan antara desa sasi dan desa non sasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2005 yang berlangsung di provinsi Maluku. Lokasi daerah penelitian di beberapa pulau yaitu Pulau Ambon, Pulau Saparua, Pulau Nusalaut, Pulau Haruku dan Pulau Seram. Penentuan pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sample* atau secara sengaja dengan mempunyai beberapa alasan dan pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Effendi 1989). Ada 61 desa yang diteliti yang terdiri dari: 22 desa di kota Ambon, 37 desa di Maluku Tengah, dan 2 desa di Seram Bagian Barat. Ke 61 desa ini terdiri dari 16 desa sasi yang melaksanakan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dan 45 desa non sasi.

2.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data efisiensi: 1) pengambilan keputusan nelayan dalam pengelolaan perikanan, 2) kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, 3) kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan

Data pemerataan: 1) tingkat aksesibilitas terhadap sumberdaya perikanan, 2) kepemilikan alat tangkap, 3) tingkat kesamaan ekonomi.

Data keberlanjutan terbagi atas keberlanjutan sosial ekonomi dan keberlanjutan biologi. Keberlanjutan sosial ekonomi: 1) kebersamaan masyarakat dalam kegiatan perikanan, 2) tingkat kesejahteraan rumah tangga, 3) kerukunan nelayan. Keberlanjutan biologi : 1) kondisi kesehatan sumberdaya perikanan, 2) kondisi hasil tangkapan sumberdaya perikanan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa instansi terkait.

2.2 Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dan hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Uji Friedman

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak perubahan sistem pemerintahan desa terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku, dengan formula sebagai berikut :

$$\chi^2 = \left[12 / nk(k+1) \left(\sum_{j=1}^k R_j^2 \right) \right] - 3n(k+1)$$

Dimana :

- χ^2 = Statistik uji 12 = Konstanta
- n = Jumlah variabel pengelolaan perikanan
- R_j = Jumlah peringkat pada rezim ke j
- k = Jumlah rezim 3 = Konstanta

2. Uji Mann-Whitney

Analisis ini digunakan untuk melihat perbedaan kinerja pengelolaan perikanan antara desa sasi yaitu desa yang melaksanakan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan desa non sasi, dengan formula sebagai berikut:

$$T = \frac{S - n1(n1 + 1)}{2}$$

Dimana :

- T = Statistik Uji
- S = Jumlah ranking untuk Desa sasi
- n1 = Jumlah variabel kinerja pengelolaan perikanan pada desa sasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efisiensi

Nilai total efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan pada rezim adat memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 8,71 dibandingkan dengan rezim sentralisasi dengan nilai 6,69 dan rezim otonomi daerah dengan nilai 7,46 (Tabel 1).

Tabel 1. Kinerja Efisiensi Pengelolaan Perikanan Pada Rezim Adat, Rezim Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA	REZIM		
	ADAT	SENTRAL	OTDA
A. Efisiensi			
1. Pengambilan Keputusan Nelayan dalam Pengelolaan Perikanan	7,03	4,77	6,46
2. Kesempatan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDP	10	10	10
3. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perikanan	9,1	5,3	5,93
Jumlah Total Rata-Rata	8,71	6,69	7,46

Sumber : Data Primer

Menurut Nikijuluw, (2002) bahwa semakin tinggi efisiensi atau produktivitasnya, semakin baik suatu rezim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan perikanan pada rezim adat adalah lebih baik.

Indikator kinerja efisiensi yang pertama adalah pengambilan keputusan oleh nelayan dalam pengelolaan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat pada rezim adat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pada rezim adat, sistem pemerintahan desa memiliki lembaga-lembaga adat seperti raja sebagai pemimpin desa sekaligus pemimpin adat serta kawang sebagai organisasi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh masyarakat, yang dapat memotivasi masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya perikanan. Pada rezim sentralisasi dimana raja dan organisasi kawang kurang memiliki peranan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan perikanan.

Indikator kinerja efisiensi yang kedua adalah kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sampai saat ini masih bebas sepenuhnya untuk memanfaatkan sumberdaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun

terjadi pergantian sistem pemerintahan desa, tidak membawa pengaruh terhadap kemudahan atau kebebasan masyarakat untuk mengakses sumberdaya ikan di perairan desanya.

Indikator kinerja efisiensi yang ketiga adalah kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan pada rezim adat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pada rezim adat, peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan yang telah ditetapkan oleh raja selaku pemimpin adat dan dilaksanakan oleh organisasi kewang mempunyai sanksi adat yang kuat dan mengikat sehingga membuat masyarakat adat tunduk dan patuh terhadap peraturan perikanan tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat yang tinggal menetap di desa tersebut adalah masyarakat adat itu sendiri. Pada rezim sentralisasi terjadi penurunan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan, selain karena tidak berfungsinya raja dan organisasi kewang secara baik, juga karena terjadi peningkatan penduduk dan mobilisasi penduduk. Selain itu, peraturan pengelolaan perikanan tidak merupakan suatu peraturan tertulis atau merupakan keputusan desa yang dapat diketahui dan dipatuhi oleh semua masyarakat desa.

3.2. Pemerataan

Nilai total pemerataan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan pada rezim adat memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 8,38 dibandingkan dengan rezim sentralisasi dengan nilai 7,01 dan rezim otonomi daerah dengan nilai 6,61 (Tabel 2).

Tabel 2. Kinerja Pemerataan Pengelolaan Perikanan Pada Rezim Adat, Rezim Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA	REZIM		
	ADAT	SENTRAL	OTDA
B. Pemerataan			
1. Tingkat Aksesibilitas Terhadap SDP	9,92	9,98	9,85
2. Kepemilikan Alat Tangkap	8,30	5,36	4,57
3. Tingkat Kesamaan Ekonomi	6,92	5,80	5,41
Jumlah Total Rata-Rata	8,38	7,01	6,61

Sumber : Data Primer

Menurut Nikijuluw (2002), bahwa kriteria pemerataan suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan adalah semakin adil, semakin baik kinerja; semakin rendah tingkat ketimpangan, semakin baik kinerjanya. Melihat hasil penelitian di atas maka pemerataan pengelolaan perikanan pada rezim adat dapat dikatakan lebih baik.

Indikator kinerja pemerataan yang pertama adalah tingkat aksesibilitas terhadap sumberdaya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya perikanan mengalami penurunan. Pada rezim adat, untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya masyarakat ataupun nelayan tidak membayarkan apapun ke desa. Namun sekarang, karena bertambahnya jumlah penduduk maka pemerintah desa mulai melakukan pengaturan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan menjaga daerah pesisir pantai.

Indikator kinerja pemerataan yang kedua adalah kepemilikan alat tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan alat penangkapan ikan mengalami penurunan dimana pada rezim adat memiliki nilai pemerataan yang lebih tinggi. Pada rezim adat hampir semua masyarakat memiliki alat penangkapan ikan yang sama berupa alat penangkapan ikan tradisional yaitu perahu, jaring, pancing dan serok. Usaha perikanan hanya cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari saja. Pada rezim sentralisasi, dimana telah terjadi peningkatan jumlah penduduk dan masuknya penduduk pendatang yang tinggal di sekitar pesisir maka terjadi perkembangan alat penangkapan yang lebih modern sehingga terjadi peralihan usaha perikanan sebagai mata pencarian utama. Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi perkembangan jumlah nelayan di Maluku.

Indikator kinerja pemerataan yang ketiga adalah tingkat kesamaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesamaan ekonomi pada masyarakat hampir memiliki kesamaan. Hal ini terjadi karena kehidupan sosial kemasyarakatan desa yang masih baik dan banyak terjadi kesadaran dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan diversifikasi usaha. Dengan beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa maka semakin baik kehidupan sosial ekonominya.

3.3 Keberlanjutan

Nilai total keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan pada rezim adat memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 8,17 dibandingkan dengan rezim sentralisasi dengan nilai 6,77 dan pada rezim otonomi daerah dengan nilai 6,28 (Tabel 3).

Tabel 3. Kinerja Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Pada Rezim Adat, Rezim Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA	REZIM		
	ADAT	SENTRAL	OTDA
C. Keberlanjutan Sosial Ekonomi			
1. Kebersamaan Masyarakat	9,10	7,28	6,44
2. Tingkat Kesejahteraan RT	4,60	6,80	7,89
3. Kerukunan Nelayan	8,60	7,30	6,40
Keberlanjutan Biologi			
1. Kondisi Umum SDP	9,79	6,10	5,30
2. Kondisi Hasil Tangkapan SDP	8,75	6,40	5,40
Jumlah Total Rata-Rata	8,17	6,77	6,28

Sumber : Data Primer

Hasil ini memperlihatkan bahwa pada rezim adat keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah lebih baik. Indikator kinerja keberlanjutan sosial ekonomi yang pertama adalah kebersamaan masyarakat dalam kegiatan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan pada rezim adat kebersamaan masyarakat dalam kegiatan perikanan lebih baik. Kebersamaan masyarakat dalam kegiatan perikanan yaitu seperti pembersihan pantai, *timba laor* yaitu suatu tradisi masyarakat untuk mengambil suatu jenis cacing laut yang disebut *laor* pada waktu dan musim tertentu yaitu di antara bulan bulan Maret dan bulan April setiap tahun. Selain itu, masyarakat sering melakukan kegiatan *bameti* yaitu suatu aktivitas mencari sumberdaya perikanan tertentu pada waktu air surut. Aktivitas bersama dalam masyarakat juga yaitu dalam membuat perahu, menjahit jaring, menaikkan dan menurunkan perahu dikala selesai melaut dan lain-lain. Kebersamaan tersebut bertujuan untuk membantu, menolong dan meringankan suatu pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dimana tidak ada imbalan ataupun upah apapun. Pada rezim sentralisasi, kondisi ini telah berubah dimana untuk membantu pekerjaan

tertentu perlu diberi upah berupa uang yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat di pedesaan mulai menurun dan memiliki kecenderungan pada kepentingan pribadi

Indikator kinerja keberlanjutan sosial ekonomi yang kedua adalah tingkat kesejahteraan rumah tangga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga pada masyarakat pedesaan mengalami peningkatan. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah kondisi perumahan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian bahwa di atas sekitar 50 % perumahan penduduk memiliki rumah permanen dan semi permanen sedangkan sisanya masih merupakan perumahan kumuh. Hal inipun sesuai dengan hasil survey Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2003. Beberapa faktor yang turut berpengaruh terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat ini adalah berkembangnya berbagai sarana dan prasarana seperti sarana pendidikan, sarana perdagangan, sarana perekonomian, sarana telekomunikasi, sarana pelabuhan, sarana kesehatan serta sarana jalan (Dinas Perikanan dan Kelautan,2004).

Indikator kinerja keberlanjutan sosial ekonomi yang ketiga adalah kerukunan masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerukunan nelayan dalam melakukan aktivitas perikanan memperlihatkan adanya penurunan. Pada rezim adat memiliki nilai kerukunan nelayan lebih tinggi, karena hampir semua nelayan tidak ada perbedaan dalam kepemilikan alat tangkap. Selain itu, karena potensi sumberdaya perikanan di pesisir pantai pedesaan juga masih baik sehingga tidak ada rasa persaingan yang dapat memicu konflik antar nelayan. Pada rezim sentralisasi, dimana terjadi perkembangan jumlah nelayan yang diikuti dengan berkembangnya armada dan alat tangkap yang lebih besar dan modern maka ada terjadi persaingan antar nelayan yang dapat memicu adanya konflik. Seperti perkembangan alat tangkap *purse seine* yang dilakukan berkelompok dimana membutuhkan banyak tenaga kerja dan memiliki aturan manajemen usaha. Hal ini tentunya memberikan perubahan dalam usaha perikanan dan bila manajemen usaha perikanan seperti pembagian hasil pendapatan yang tidak benar maka akan memicu konflik nelayan. Masalah sosial lain yang sering terjadi dalam masyarakat umumnya terutama nelayan adalah minuman keras. Ada suatu kebiasaan

bagi nelayan bahwa sebelum pergi ke laut dimana akan berhadapan dengan tantangan ombak dan angin maka perlu minum sedikit minuman keras untuk menghilangkan rasa takut dan pusing. Kondisi ini memang sering dilakukan, namun apabila kebiasaan ini tidak terkontrol dan dilakukan secara berlebihan maka akan menimbulkan masalah keributan, perkelahian, kekacauan yang berdampak terhadap hal-hal yang negatif dan merugikan masyarakat. Pada rezim adat, cara penyelesaian konflik dalam masyarakat dapat cepat diselesaikan dengan mengacu pada tatanan kelembagaan adat. Dimana kewang berfungsi sebagai penjaga keamanan desa dan masyarakat sehingga konflik yang terjadi dalam masyarakat akan lebih cepat diselesaikan dan masyarakat menjadi rukun kembali.

Indikator kinerja keberlanjutan biologi yang pertama adalah kondisi kesehatan sumberdaya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan kondisi kesehatan sumberdaya perikanan. Pada rezim adat kondisi kesehatan sumberdaya perikanan berada dalam kondisi yang lebih baik. Kondisi ini didukung dengan adanya peraturan pemerintah negeri adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dimana organisasi kewang mempunyai peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan perikanan tersebut. Pada rezim sentralisasi, terjadi banyak perubahan yang disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah nelayan dan usaha perikanan yang diikuti dengan bertambahnya jumlah armada dan alat perikanan tangkap. Suatu kondisi yang dilematis dimana di satu pihak berkembangnya usaha perikanan tangkap sedangkan di pihak yang lain kondisi kesehatan perairan yang semakin menurun akibat tingkah laku manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti menebang pohon bakau untuk dijadikan bahan bakar dan bahan bangunan demikian juga pengambilan karang dan pasir. Selain itu, masyarakat juga suka membombardir dan meracuni ikan sebagai salah satu cara alternatif yang cepat untuk mendapatkan ikan, pencemaran dari bahan bakar yang di pergunakan oleh armada tangkap ataupun pembuangan sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Meskipun terjadi penurunan kondisi kesehatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir pedesaan Maluku, namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya daerah-daerah pesisir terutama di pulau Saparua, pulau Haruku dan pulau Nusalaut masih memiliki keadaan sumberdaya perikanan yang tergolong masih baik yang dapat diamati dari jenis dan ukuran ikan yang tertangkap

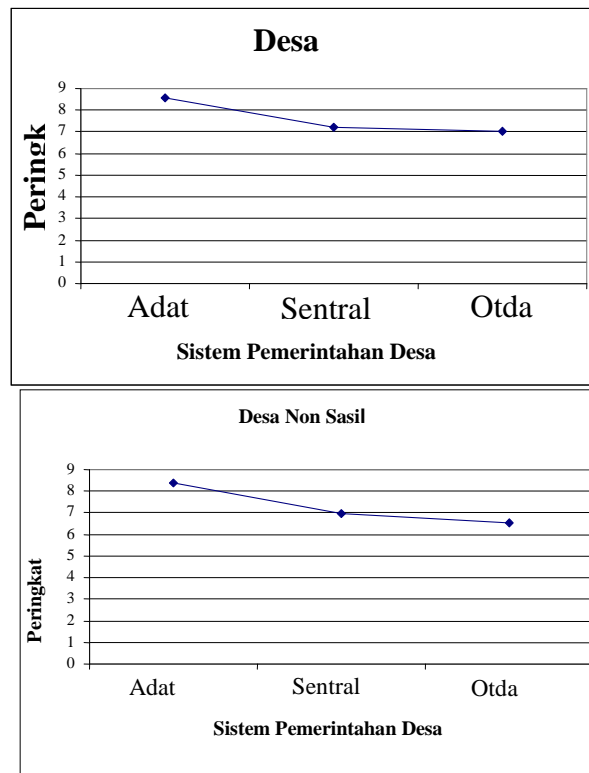
oleh nelayan. Selain itu, berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi potensi sumberdaya perikanan di kabupaten Maluku Tengah tahun 2003 bahwa kondisi terumbu karang, pandang lamun dan hutan mangrove di atas 50 % masih berada dalam kategori baik. Pada rezim otonomi daerah, pemerintah desa dan masyarakat mulai memperhatikan penerapan sasi secara umum dan sasi laut secara khusus sebagai bagian dari pelaksanaan kelembagaan adat. Penerapan sasi laut diharapkan sebagai salah satu alternatif pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang dapat menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Indikator kinerja keberlanjutan biologi yang kedua adalah kondisi hasil tangkapan sumberdaya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi hasil tangkapan sumberdaya perikanan mengalami penurunan. Pada rezim adat memperlihatkan keadaan dimana sumberdaya perikanan sangat banyak sehingga masyarakat dengan mudah memanfaatkan sumberdaya perikanan. Pada rezim adat ketersediaan ikan dan sumberdaya perikanan lainnya berlimpah dan terdapat bermacam jenis ikan dan berada didekat pesisir desa sehingga sangat mudah untuk menangkap ikan dengan peralatan tangkap yang sederhana. Pada rezim sentralisasi dimana pemerintah mulai menggalakan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan memberikan bantuan peralatan dan armada tangkap di desa-desa yang potensial perikanan tangkap, terlihat bahwa hasil usaha perikanan tangkap semakin hari semakin bertambah dan terjadi peningkatan produksi perikanan. Selain itu juga berkembangnya perusahaan perikanan tangkap dengan memiliki alat pengumpul ikan seperti rumpon yang banyak diletakan di depan wilayah perairan desa. Hal ini yang merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah hasil tangkapan di daerah perairan desa. Masyarakat nelayan yang memiliki armada dan alat tangkap yang terbatas maka akan terasa sulit untuk mendapatkan ikan di sekitar wilayah perairan desa. Kondisi seperti ini, sering memicu masyarakat untuk melakukan cara-cara yang destruktif seperti membom dan meracuni ikan yang berakibat pada menurunnya kondisi kesehatan sumberdaya perikanan. Penurunan jumlah hasil tangkapan sumberdaya perikanan di wilayah perairan pedesaan merupakan suatu realitas dimana upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus perlu ditata kembali secara baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada rezim otonomi daerah, dimana masyarakat

lokal diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola sumberdaya perikanan di wilayah perairan mereka maka diharapkan penerapan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat melalui lembaga-lembaga adat dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perikanan yang berkelanjutan di wilayah perairan pedesaan Maluku.

3.4. Perbedaan Kinerja Sistem Pengelolaan Perikanan Antara Desa Sasi dan Desa Non Sasi

Hasil analisis dengan menggunakan uji Man Whitney terhadap nilai efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan pada desa sasi dan desa non sasi pada rezim adat, sentralisasi maupun otonomi daerah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan (Gambar 1.)



Gambar 1 Kinerja Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pada Desa Sasi dan Desa Non Sasi

Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dengan sistem sasi belumlah efektif sepenuhnya dilaksanakan secara baik di pedesaan Maluku sehingga belum memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi masyarakat di pedesaan Maluku. Hasil ini sesuai dengan yang dilaporkan Novaczek *et al.* (2001) dan Harkes (2006) bahwa *performance* pengelolaan sumberdaya perikanan pantai dengan sistem sasi di Maluku Tengah ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan pada beberapa tahun sebelumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Perubahan sistem pemerintahan desa berdampak terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di pedesaan Maluku.
- 2) Tidak ada perbedaan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan antara desa sasi dan desa non sasi.

4.2. Saran

- 1) Perlu ada upaya untuk mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat yang telah ada dengan melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa terutama raja dan organisasi Kewang maupun masyarakat lokal melalui proses pembinaan dan pendidikan non formal secara berkelanjutan.
- 2) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam bentuk ko-manajemen sumberdaya perikanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tengah, 2004. Inventarisasi dan Identifikasi potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2003.
- Harkes, I. H.T, 2006. *Fisheries Co-Management, The Role of Local Institution and Decentralisation in Southeast Asia*. With Specific Reference to Marine Sasi in Central Maluku, Indonesia. UFB/GrafiMedia.
- Kissya, E. 2000. Sasi Sebagai Pedoman dan Cara Anak Negeri Haruku Mengelola Kawasan Pesisir. Makalah Prosiding Konperensi Nasional II Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia.
- Nikijuluw, V.P. 1994. Sasi Sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) Di Pulau Saparua, Maluku. Jurnal Penelitian Perikanan Laut Nomor 93 Tahun 1994. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Novaczek, I., Ingvild H.T. Harkes, Julianti Sopacua, Marcus D.D. Tatuhey., 2001. *An Institutional Analysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia*. ICLARM - The World Fish Center. Penang, Malaysia.
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3ES, Jakarta.